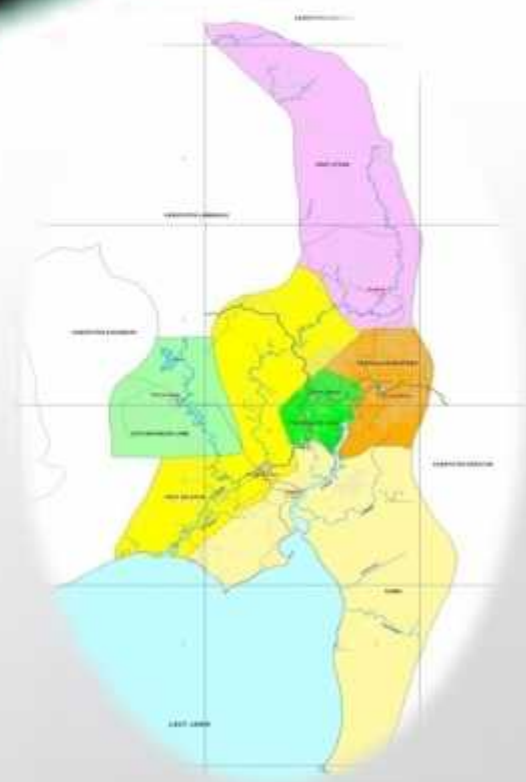


RENCANA KERJA

2 0 1 8



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun 74112

Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002

Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 050 /34/Bapp-I/ 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. Bahwa Renja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD serta Rencana Strategis SKPD;

c. bahwa RENJA SKPD merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c di atas, Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 perlu diatur dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Renja Bappeda) Tahun 2018;
- KEDUA : Renja Bappeda Kab. Kobar Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018 dan penjabaran lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
- KETIGA : Renja Bappeda Kab. Kobar Tahun 2018 wajib di laksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 25Agustus 2017

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

ttd

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP . 19630923 199003 1 010
Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BAPPEDA) Tahun 2018 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2017

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630923 199003 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Bappeda 2017-2022 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 3

3.3 Program dan Kegiatan 7

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 3.1	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BAPPEDA Kab. Kobar) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi dan misi RPJMD dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2018;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2018 mengikuti tata

cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum dan Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini adlah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaliasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54

Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BAPPEDA Kab. Kobar Tahun 2018 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu Dan Capaian Renstra BAPPEDA

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA
Tahun 2016 Kab. Kotawaringin Barat

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	946.038.400	872.291.579	92,20	96,43	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	199.075	66,36	100	Terlaksananya surat-menyurat kantor Bappeda	1	1	Tah un
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	219.000.000	197.027.792	89,97	94,76	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda	1	1	Tah un
c.	Penyediaan jasa pemeliharaaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.300.000	3.624.000	57,52	57,52	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	2 18	2 18	Lem bar Lem bar
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	146.726.900	142.001.550	96,78	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Bappeda ~ Tenaga administrasi ~ Petugas keamanan/pe njaga malam	~ 1 ~ 2	~ 1 ~ 2	~ O rg ~ O rg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.958.400	77.874.000	93,87	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor ~ Honor petugas kebersihan ~ Peralatan kebersihan	4 1	4 1	ora ng pak et
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	46.640.000	38.245.000	82,00	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BAPPEDA berupa : ~ Komputer Dekstop ~ Note Book ~ Printer ~ Proyektor ~ Mesin Cetak (Ploter) ~ Pemeliharaan server	~ 1 6 ~ 1 1 ~ 1 2 ~ 5 ~ 1 ~ 1	~ 16 ~ 11 ~ 12 ~ 5 ~ 1 ~ 1 ~ 1	~ U ni t ~ U ni t ~ U ni t ~
g.	Penyediaan alat tulis kantor	56.006.500	55.405.125	98,93	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Tah un
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.130.000	60.130.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop - Bupati -Setda -Bappeda Stopmap Bappeda Penggandaan/ Fotocopy	6 6 6 10 790 00	6 6 6 10 7900 0	Pak Pak Pak Pak Lbr
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.172.000	8.172.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Bappeda	7	7	jeni s
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28.850.000	25.934.561	89,89	98,27	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Printer ~ Mesin Fax ~ Mesin Ketik ~ Flash Disk ~ Keyboard	~ 6 ~ 1 ~ 1 ~ 1 0	~ 6 ~ 1 ~ 1 ~ 10 ~ 3	~ U ni t ~ U ni t ~ U ni t

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						~ USB Port ~ Mouse ~ Staples Besar	~ 3 ~ 5 ~ 1 0 ~ 1	~ 5 ~ 10 ~ 1	t ~
k.	Penyediaan makanan dan minuman	34.420.000	26.200.000	76,12	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	10 20	8 20	ora ng Rap at
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.534.600	237.478.476	92,57	92,57	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tah un
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	283.200.000	274.926.750	97,08	97,08	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.000.000	31.920.000	99,75	100	Terlaksanannya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ~ Pengadaan AC ruangan	4	4	Unit
b.	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	30.000.000	100	100	Tersediannya lemari arsip Bappeda ~ Pengadaan Almari rak	10	10	Unit
c.	Pemeliharaaan rutin/ berkala gedung kantor	55.000.000	47.618.000	86,58	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ~ Perbaikan lantai dan toilet kantor ~ Rehab ruang makan	1 1	1 1	Pak et
d.	Pemeliharaaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	146.000.000	145.253.950	99,49	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	18 2	18 2	Unit unit
e.	Pemeliharaaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	20.200.000	20.134.800	99,68	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ~ AC ~ mesin potong rumput ~ Speaker sound system	21 2 6	21 2 6	unit unit bua h
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	22.500.000	22.500.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.500.000	22.500.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Bappeda	45	45	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	115.000.000	97.490.012	84,77	84,77	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	115.000.000	97.490.012	84,77	84,77	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	18	15	orang
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.839.000	2.567.000	90,42	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.275.000	1.063.000	83,37	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Lakip Bappeda - RKA Bappeda - DPA Bappeda	1 1 1	1 1 1	Eks Eks eks
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	230.000,	230.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3	3	eks
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.334.000	1.274.000	95,50	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	5	eks
6.	Program pengembangan data informasi	269.613.950	252.657.855	93,71	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan data informasi	1	1	keg.
a.	Penyusunan data informasi kebutuhan penyusunan dok. perencanaan	269.613.950	252.657.855	93,71	100	Terlaksananya kegiatan : ~ Rapat Koordinasi regional PDRB se-kalteng ~ dokumen SIPD Kobar	1 50	1 50	Keg. buku
7.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat	116.670.000	86.257.001	73,93	73,93	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tumbuh					strategis dan cepat tumbuh			
a.	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kotawaringin Barat	116.670.000	86.257.001	73,93	73,93	Terlaksananya rapat koordinasi BKPRD dan pengendalian pemanfaatan ruang - Rapat BKPRD - Dokumen perda RTRW Kab.	588	40	Kaliks
8.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.023.579.500	906.874.009	88,60	95,84	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah	6	6	keg.
a.	Penyusunan rancangan RPJMD	237.045.000	179.425.509	75,69	100	Tersusunnya rancangan teknokratis RPJMD	50	50	eks
b.	Penyusunan rancangan RKPD	37.205.000	32.705.000	87,90	87,90	Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD	50	50	eks
c.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	165.379.000	161.840.000	97,86	100	Terselenggaranya fasilitasi musrenbangcam , Forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD	3	3	keg.
d.	Penetapan RKPD	57.464.500	53.840.500	93,69	96,08	Terlaksananya penetapan RKPD yang memuat hasil dari musrenbang	2	2	dok.
e.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	131.596.000	118.082.000	89,73	93,16	Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	2	2	dok.
f.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	254.890.000	245.701.000	96,39	98,95	Terlaksananya pengendalian terhadap program dan kegiatan pembangunan	2	2	Keg
g.	Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah	140.000.000	115.280.000	82,34	82,71	Terlaksananya penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka menunjang pengembangan sistem informasi perencanaan daerah berupa : ~ Pengembangan aplikasi siporda ~ Softwere	11	11	Aplikasi

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						windows server standar 2012 R2,OVL+CAL			Unit
9.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	511.443.400	423.646.901	82,83	84,27	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi	3	3	keg.
a.	Penyusunan Masteplan Pembangunan Ekonomi Daerah	211.502.500	185.216.901	87,57	88,93	Tersusunnya dokumen Minapolitan Budidaya Perairan Umum	1	1	dok
b.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	213.701.900	187.566.000	87,77	89,88	Tersusunnya dokumen panduan pengembangan ekonomi masyarakat	1	1	dok
c.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	86.239.000	50.846.000	58,98	58,98	Terlaksananya rapat koordinasi SKPD lingkup bidang ekonomi, tim pengendali inflasi daerah dan penanaman modal	10	3	Rapat
10.	Program perencanaan sosial budaya	155.834.000	136.564.300	87,63	96,68	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya	2	2	keg.
a.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	95.125.000	88.915.300	93,47	95,15	Tersusunnya : ~ RAD dalam penanggulangan kemiskinan ~ RAD PM2L	1 1	1 1	dok. dok.
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.709.000	47.649.000	78,49	99,08	Tersedianya : ~ Data/ laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan Data/ laporan hasil pelaksanaan PM2L ~ Pelatihan peningkatan kapasitas TKPKD	2 1	2 1	dok. Keg
11.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	56.133.000	39.699.950	70,72	72,60	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	1	keg.
a.	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	56.133.000	39.699.950	70,72	72,60	Terlaksananya rapat koordinasi	5	5	Rapat
12.	Program perencanaan pengembang	76.363.750	61.818.750	80,95	87,23	Terlaksanya koordinasi perencanaan	1	1	Keg .

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satua n
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	an kota-kota menengah dan besar					bidang sanitasi, drainase dan air minum skala kabupaten			
a.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	76.363.750	61.818.750	80,95	87,23	Terlaksananya koordinasi meliputi - Monitoring dan evaluasi keg. Dokumen MPS - Monitoring dan evaluasi keg. Dokumen RAD AMPL - Monitoring dan evaluasi keg.Pamsimas II	1 1 1	1 1 1	Keg Keg Keg

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2016 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :
- Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kegiatan Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan capaian 74 % dari target sebesar100%;
 - Program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian 59% dari target sebesar 100%.
- b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
1. Program Pelayanan Administra si Perkantoran dengan kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
 - Pembangunan gedung kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
 3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan :
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 6. Program pengembangan data informasi dengan kegiatan :
 - Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 7. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan :
 - Penyusunan rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Penetapan RKPD

- Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah
8. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan :
 - Penyusunan Masteplan Pembangunan Ekonomi Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 9. Program perencanaan sosial budaya dengan kegiatan :
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 10. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan
 - Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
 11. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
 - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Tidak tercapainya target pada program perencanaan pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh dikarenakan Perda RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat masih dalam proses evaluasi gubernur dan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dikarenakan jumlah rapat yang direncanakan 10 kali dan hanya dilaksanakan sebanyak 3 kali rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah. Hal ini yang menyebabkan realisasi pada kegiatan tersebut tidak tercapai yang berakibat juga pada capaian program.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA BAPPEDA.

Dikarenakan tidak tercapainya target pada 1 program dan 1 kegiatan, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi capaian RENSTRA BAPPEDA dan tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut, namun diperlukan koordinasi agar dalam proses penyelesaiannya dapat disegerakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja menurut bidang urusan perencanaan pembangunan adalah :

No.	Indikator	2015	2016		
			Targe t	Realisas i	%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telahdi tetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	100 %
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	100 %
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	100 %
4.	Tersediannya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	tida k	ada	tidak	0%

Dan kondisi pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2016 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah RPJM yang diperdakan	Dokumen	N I H I L	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Jumlah RKPd yang diperkadakan	Dokumen		1	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	100	200	200	200	200
3	Jumlah Aplikasi (SIPPD)	Sistem				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	100	100	200	200	200
4	Jml. penelitian yang dihasilkan	Dokumen				-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jml. penelitian yang dijadikan pedoman dlm perenc. Pemb.	Dokumen				3	4	4	4	4	5	3	3	2	2	167	75	75	50	50
6	Jumlah rapat BKPRD	kali Rapat				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
7	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Dokumen				3	2	2	2	2	0	1	2	2	1	0	50	100	100	50
8	Jumlah rapat evaluasi bulanan	kali Rapat				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
9	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan	kali Rapat				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
10	Jml. Rapat evaluasi tahunan dan rencana anggaran th. berikutnya	kali Rapat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
11	Jumlah LKPJ	Dokumen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100	100	100	100	200

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Jumlah Rakor Bidang Ekonomi	kali Rapat				4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	100	100	75	75	75
13	Jml Rakor Bid. Sarana prasarana	kali Rapat				4	4	4	4	4	8	8	9	9	11	200	200	225	225	275
14	Jumlah Rakor Pemkesra	kali Rapat				4	4	4	4	4	4	4	4	3	7	100	100	100	75	175
15	Jumlah Rapat internal Bappeda	kali Rapat				12	12	12	12	12	20	20	20	20	20	167	167	167	167	167
16	Jumlah Monev Pemb. daerah	Kunjunga n				2	2	2	2	2	8	8	10	10	17	400	400	500	500	850
17	Prosentase Program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD	%				100	100	100	100	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
18	Jumlah Kerjasama antar daerah	MOU				1	2	2	2	2	1	0	1	0	1	100	0	50	0	50
19	Jumlah Musrenbang Kecamatan	kali Rapat				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
20	Jumlah Forum Bappeda	kali Rapat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
21	Jumlah Musrenbang kabupaten	kali Rapat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
22	Jml. Koord. penanaman modal	kali Rapat				2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	50	50	0	0	0
23	Jumlah pegawai yang terlatih	Pegawai				36	36	36	36	36	12	12	12	13	15	33	33	33	36	42

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD);
3. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
4. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan kelembagaan vertikal lain;
5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
6. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Bappeda.

Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2017-2022 ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 indikator utama yaitu :

1. Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan;
2. Persentase capaian kinerja SKPD;
3. Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan);
4. Persentase ketercukupan administrasi perkantoran.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Secara struktur organisasi, saat ini BAPPEDA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang diisyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional (Perencanaan, Penelitian dan Arsiparis) belum ada. Keberadaan sekretariat dan lima bidang (Bidang Penelitian & Perencanaan Daerah; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial dan Pemerintahan; Bidang Sarana dan Prasarana; Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di Bappeda. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik, disebabkan karena masih rendahnya kemampuan SDM perencanaan dan penelitian dan penelitian dalam analisis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan, disebabkan masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan);
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, bidang

penelitian dan pengembangan, bidang ekonomi dan bidang sosial pemerintahan dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif.

- c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sesuai RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Visi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

“ Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata “

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Memperkuat tata pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Misi Ketiga : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengolahan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Misi Keempat : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Misi Kelima : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Misi keenam : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Bappeda mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mendukung visi RPJMD terletak pada misi pertama yaitu memperkuat tata pemerintah yang bersih, efektif, demokratis

dan transparan, dukungan Bappeda dalam mewujudkannya melalui peningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta peningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan peningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan.

- d. Tantangan dan peluang dalaam meningkatkan pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
- Disamping permasalahan seperti yang pada poin b diatas, Bappeda memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kobar Ikhlas 2022. Dalam rangka menuju Kobar Ikhlas, Bappeda memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut :

No	Tantangan	Peluang
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
2	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
4	Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
5	Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kotawaringin Barat

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda Kab. Kobar	Cakupan layanan administrasi kantor	90%	1.296.089.400	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda Kab. Kobar	Cakupan layanan administrasi kantor	90%	1.296.089.400	
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah paket/surat terkirim	10 paket/surat	300.000	1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah paket/surat terkirim	10 paket/surat	300.000	
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Kobar	Biaya langganan telepon dan koran	12 bulan	278.400.000	1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Kobar	Biaya langganan telepon dan koran	12 bulan	278.400.000	
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4 (2 unit) ; R2 (18 unit)	6.300.000	1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4 (2 unit) ; R2 (18 unit)	6.300.000	
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	311.694.000	1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	311.694.000	
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jasa dan jenis alat kebersihan kantor	22 Jenis	142.251.400	1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jasa dan jenis alat kebersihan kantor	22 Jenis	142.251.400	
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah perbaikan peralatan kerja	54unit	41.950.000	1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah perbaikan peralatan kerja	54unit	41.950.000	
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	51 jenis	58.374.000	1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	51 jenis	58.374.000	
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	32.190.000	1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	32.190.000	
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	9.930.000	1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	9.930.000	
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 jenis	182.500.000	1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 jenis	182.500.000	
1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	7 bh	17.200.000	1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	7 bh	17.200.000	
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	400 orang	6.000.000	1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	400 orang	6.000.000	
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28 kali perjalanan dinas	209.000.000	1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28 kali perjalanan dinas	209.000.000	

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	90%	1.965.130.000	1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	90%	1.965.130.000	
1.06.1.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	1.448.000.000	1.06.1.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	1.448.000.000	
1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6 Jenis	135.500.000	1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6 Jenis	135.500.000	
1.06.1.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 unit	5.000.000	1.06.1.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 unit	5.000.000	
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	204.000.000	1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	204.000.000	
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Kobar	Jenis dan mebel yang diadakan	4 unit	88.250.000	1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Kobar	Jenis dan mebel yang diadakan	4 unit	88.250.000	
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	20 unit = R4 (2 bh) ; R2 (18 bh)	71.500.000	1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	20 unit = R4 (2 bh) ; R2 (18 bh)	71.500.000	
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	9.130.000	1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	9.130.000	
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	15 unit	3.750.000	1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	15 unit	3.750.000	
1.06.1.06.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Luas gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	1.06.1.06.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Luas gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat kepatuhan aparatur	90%	73.500.000	1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat kepatuhan aparatur	90%	73.500.000	
X.XX.XX.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah mesin absen elektronik	1 unit	7.500.000	X.XX.XX.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah mesin absen elektronik	1 unit	7.500.000	
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel baju PDH	33.000.000	1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel baju PDH	33.000.000	
1.06.1.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	60 stel baju batik	33.000.000	1.06.1.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	60 stel baju batik	33.000.000	
1.06.1.06.01.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	90%	20.000.000	1.06.1.06.01.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	90%	20.000.000	
1.06.1.06.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	20.000.000	1.06.1.06.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	20.000.000	
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	158.500.000	1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	158.500.000	
1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	18 orang	158.500.000	1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	18 orang	158.500.000	
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%	23.370.000	1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%	23.370.000	
1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	450.000	1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	450.000	
1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	225.000	1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	225.000	
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	22.695.000	1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	22.695.000	

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.03.XX.21	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD	80%	74.300.000	4.03.XX.21	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD	80%	74.300.000	
4.03.XX.21.xx	Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Bappeda Kab. Kobar	Tersusunnya data dan informasi pembangunan	100%	36.000.000	4.03.XX.21.xx	Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Bappeda Kab. Kobar	Tersusunnya data dan informasi pembangunan	100%	36.000.000	
4.03.XX.21.xx	Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah fasilitasi koordinasi litbang untuk mendukung pembangunan daerah	4 kali rapat	38.300.000	4.03.XX.21.xx	Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah fasilitasi koordinasi litbang untuk mendukung pembangunan daerah	4 kali rapat	38.300.000	
4.03.XX.28	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	119.770.000	4.03.XX.28	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	119.770.000	
4.03.XX.28.03	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Bappeda Kab. Kobar	Dokumen penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 dokumen	61.970.000	4.03.XX.28.03	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Bappeda Kab. Kobar	Dokumen penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 dokumen	61.970.000	
4.03.XX.28.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Kobar	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarpras	1 laporan	57.800.000	4.03.XX.28.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Kobar	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarpras	1 laporan	57.800.000	
4.03.XX.21	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD	80%	898.362.600	4.03.XX.21	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD	80%	898.362.600	
4.03.XX.21.08	Penyusunan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	19.500.000	4.03.XX.21.08	Penyusunan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	19.500.000	
4.03.XX.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	8 kali	169.138.000	4.03.XX.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	8 kali	169.138.000	
4.03.XX.21.10	Penetapan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	51.875.000	4.03.XX.21.10	Penetapan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	51.875.000	
4.03.XX.26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	90%		4.03.XX.26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	90%		
4.03.XX.26.03	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen LKPj	4 dokumen	46.649.600	4.03.XX.26.03	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen LKPj	4 dokumen	46.649.600	
4.03.XX.26.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	12 laporan	176.950.000	4.03.XX.26.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	12 laporan	176.950.000	
4.03.XX.26.02	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen evaluasi	5 laporan	108.250.000	4.03.XX.26.02	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen evaluasi	5 laporan	108.250.000	
4.03.XX.26.04	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	3 sistem	326.000.000	4.03.XX.26.04	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	3 sistem	326.000.000	

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kode	Program dn Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.06.1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	616.900.000	1.06.1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	616.900.000	
4.03.XX.22.08	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas	Bappeda Kab. Kobar	Dokumen review produk unggulan daerah	1 dokumen/1 laporan	150.500.000	4.03.XX.22.08	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas	Bappeda Kab. Kobar	Dokumen review produk unggulan daerah	1 dokumen/1 laporan	150.500.000	
4.03.XX.22.09	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi	Bappeda Kab. Kobar	Dokumen review ICOR	1 dokumen/1 laporan	147.000.000	4.03.XX.22.09	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi	Bappeda Kab. Kobar	Dokumen review ICOR	1 dokumen/1 laporan	147.000.000	
4.03.XX.22.10	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	Bappeda Kab. Kobar	Laporan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3 laporan	73.000.000	4.03.XX.22.10	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	Bappeda Kab. Kobar	Laporan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3 laporan	73.000.000	
4.03.XX.30	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan			4.03.XX.30	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan			
4.03.XX.27.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Bappeda Kab. Kobar	Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	1 dokumen	246.400.000	4.03.XX.27.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Bappeda Kab. Kobar	Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	1 dokumen	246.400.000	
4.03.XX.30	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	468.950.000	4.03.XX.30	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	468.950.000	
4.03.XX.27.03	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Tersedianya Dokumen Kajian Akademik Pemekaran kecamatan & Kelurahan/Desa	1 dokumen	248.400.000	4.03.XX.27.03	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Tersedianya Dokumen Kajian Akademik Pemekaran kecamatan & Kelurahan/Desa	1 dokumen	248.400.000	
4.03.XX.27.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Bappeda Kab. Kobar	Tersedianya Dokumen Pengembangan Data dan Pemetaan Kualitas Pendidikan	1 dokumen	220.550.000	4.03.XX.27.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Bappeda Kab. Kobar	Tersedianya Dokumen Pengembangan Data dan Pemetaan Kualitas Pendidikan	1 dokumen	220.550.000	
4.03.XX.28	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	60.775.000	4.03.XX.28	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	60.775.000	
4.03.XX.28.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	Bappeda Kab. Kobar	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur	1 laporan	60.775.000	4.03.XX.28.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	Bappeda Kab. Kobar	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur	1 laporan	60.775.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappeda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke 3 (tiga) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2018 dan RKPD Kab. Kobar Tahun 2018 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Kobar Tahun 2018 dan memperhatikan tema RKP dan RKPD, yaitu :

- Tema RKP 2018 “ Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”
- Tema RKPD Prov. Kalteng 2018 “ Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Alam Disertai Penguatan SDM yang Berkualitas “
- Tema RKPD Kab. Kobar 2018 “ Pemanfaatan Infrastruktur Untuk Mengurangi Disparitas Antar Wilayah di Kab. Kobar ”.

Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas Prov. Kalteng dengan Prioritas Daerah Kab. Kobar

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Kab.Kobar	Prioritas Prov. Kalteng
1.	Pendidikan	Pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2.	Kesehatan	Kesehatan	
3.	Perumahan dan Permukiman	-	-
4.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Ekonomi, Industri dan Perdagangan	Pengelolaan industri pariwisata
5.	Ketahanan Energi	-	-
6.	Ketahanan Pangan	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	-
7.	Penanggulangan Kemiskinan	Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
			Peningkatan pendapatan masyarakat
8.	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	Perhubungan	Pemerataan infrastruktur wilayah
9.	Pembangunan Wilayah	-	Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata ruang wilayah
10.	Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan	Pemerintahan dan Hukum	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
		Keamanan	
11.	-	Pemuda, Olah Raga & Pencegahan Narkoba	-
12.	-	Pengelolaan Potensi Daerah, Sda Dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan
13.	-	-	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
14.	-	Agama dan kemasyarakatan	-

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka Prioritas Nasional dan Prioritas Prov. Kalteng Tahun 2018 yang berkaitan langsung adalah pada prioritas ke – 10 yaitu Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Tahun 2018 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Bappeda Tahun 2017 – 2022 sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPMD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD & BAPPEDA	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
							2017	2018	2019	2020	2021	
							2022					
1	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)				<i>Indeks Good Governance (dalam skala)</i>	NA	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,28
		Meningkatnya sistem			Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A
		Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	NA	80	80	80	90	90	90	
		Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.		NA	80	80	80	90	90	90		
		Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan	Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.	NA	80	80	80	90	90	90		

No	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPMD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD & BAPPEDA	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
			sektoral yang berkualitas	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	NA	80	80	80	90	90	90
				Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	NA	80	80	80	90	90	90
			Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Aparatur	NA	80	80	80	90	90	90
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	NA	80	80	80	90	90	90

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2018

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018, Program dan Kegiatan Tahun 2018 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat;
- b. Bersinergi dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bappeda.

Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2018 direncanakan berjumlah 11 program dan 46 kegiatan yang sebagian besar merupakan program dan kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 5.775.647.000,- seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kab. Kotawaringin Barat

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran			Indeks Kepuasan Aparatur	%	80		80	
				Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	80	3.536.589.400	80	2.890.111.500
		00.0.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	80	158.500.000	80	126.000.000
		05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	18	158.500.000	23	126.000.000
		00.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	80	1.296.089.400	80	1.231.559.500
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Paket/surat	10	300.00	10	300.00
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	278.400.000	12	246.600.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	20	6.300.000	20	7.350.000
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	311.694.000	12	317.927.880
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	Jenis	22	142.251.400	22	142.251.400
		01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki	Unit	54	41.950.000	57	43.450.000
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	51	58.374.000	55	70.000.000
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	32.190.000	6	24.020.220
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	9.930.000	7	12.510.000
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	9	182.500.000	7	96.150.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	buah	9	17.200.000	1	3.000.000
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum rapat	Orang	400	6.000.000	400	8.000.000
		01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	28	209.000.000	40	260.000.000
		00.0.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	%	80	1.965.130.000	80	1.421.700.000
		02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	2	1.448.000.000	3	400.000.000
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	-	-	-
		02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	6	135.500.000	5	70.000.000
		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	1	5.000.000	1	2.000.000
		02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	Jenis	5	204.000.000	7	173.000.000
		02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	4	88.250.000	1	25.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
			kantor						
		02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	20	71.500.000	20	80.000.000
		02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	2	9.130.000	1	9.600.000
		02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jenis	1	3.750.000	2	12.100.000
		02.23	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/rehab	Unit	-	-	3	650.000.000
		00.0.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	80	73.500.000	80	66.000.000
		03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	unit	1	7.500	-	-
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Orang	60	33.000.000	60	33.000.000
		03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Orang	60	33.000.000	60	33.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		00.0.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	%	80	20.000.000	80	20.000.000
		04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	1	20.000.000	1	20.000.000
		00.0.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	80	23.370.000	80	24.852.000
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	1	450.000	1	1.712.000
		06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	1	225.000	1	140.000
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	22.695.000	1	23.000.000
		TOTAL				3.536.589.400		2.890.111.500	

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	%	80		80	
	Terpenuhi ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.			Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80		80	
		40.7.15	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	314.813.000	80	801.000.000
		15.01	Review RPJPD	Jumlah dokumen review RPJPD yang dihasilkan	Dok	-	-	-	-
		15.02	Review RPJMD	Jumlah dokumen review RPJMD yang dihasilkan	Dok	-	-	1	250.000.000
		15.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terlaksanannya kegiatan musrenbang RPJMD	Keg.	-	-	-	-

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju	
						target	Rp	Rencana Tahun 2019	
								target	Rp
		15.04	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang dihasilkan	Dok	-	-	-	-
		15.05	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Keg.	8	169.138.000	8	190.000.000
		15.06	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD yang dihasilkan	Dok	2	19.500.00	2	50.000.000
		15.07	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	Dok	2	51.875.000	2	61.000.000
		15.08	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	%	100	36.000.000	100	50.000.000
		15.09	Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&pengembangan pembangunan daerah	Kali rapat	4	38.300.000	10	200.000.00

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan			Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	%	80		80	
				Persentase capaian kinerja SKPD	%	80		80	
		40.3.15	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	80	657.849.600	80	879.288.500
		15.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	Laporan	12	176.950.000	12	322.135.000
		15.02	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Sistem informasi	3	326.000.000	3	247.500.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		15.03	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Laporan	5	108.250.000	5	171.585.000
		15.04	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Dok	4	46.649.600	4	138.068.500
	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)			Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	%	80		80	
		40.3.16	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	180.545.000	80	1.140.000.000
		16.01	Penyusunan perencanaan program	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	Dok	1	60.775.000	4	480.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
			pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur						
		16.02	Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dok	1	57.800.000	2	360.000.000
		16.03	Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Dok	1	61.970.000	1	300.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		40.3.17	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	370.500.000	80	1.316.100.000
		17.01	Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Dok	2	150.500.000	3	438.700.000
		17.02	Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	Dok	2	147.000.000	3	438.700.000
		17.03	Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Dok	2	73.000.000	3	438.700.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		40.3.18	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	715.350.000	80	1.753.500.000
		18.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Dok	2	220.550.000	2	351.650.000
		18.02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	Dok	2	246.400.000	6	1.173.700.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2018		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						target	Rp	target	Rp
		18.03	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Dok	2	248.400.000	2	101.500.000
						2.239.057.600		5.889.888.500	
Total Belanja Langsung						5.775.647.000		8.780.000.000	

Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat

ttd

Drs. WAHYUDI, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630923 199003 1 010



BAB IV

P E N U T U P

RENJA Bappeda Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Bappeda Tahun 2017-2022. RENJA Bappeda Tahun 2018 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, sehingga Visi dan Misi RPJMD Kotawaringin Barat serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparatur Bappeda secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkaah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.